



PT MUTUAGUNG LESTARI

Sustainable Forest Management Certification

RINGKASAN PUBLIK

RE-SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI

PT DIAMOND RAYA TIMBER

KABUPATEN ROKAN HILIR & KOTA DUMAI – PROVINSI RIAU

Luas Areal 90.956 ha

Cimanggis, Juni 2006



PRAKATA

Kegiatan Re-Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari di PT Diamond Raya Timber (PT DRT) yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Provinsi Riau bersifat sukarela, PT DRT mengajukan aplikasi ulang (re-sertifikasi) kepada PT Mutuagung Lestari (MUTU Certification) sebagai lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Lembaga Ekolabel Indonesia pada bulan Juli 2005 untuk dinilai kinerja pengelolaan hutannya sesuai dengan sistem dan standar Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) dari Lembaga Ekolabel Indonesia.

Pelaksanaan re-sertifikasi yang dilakukan terhadap PT DRT melalui empat tahapan proses sertifikasi PHAPL menurut sistem dan standar LEI, yaitu Pra-penilaian Lapangan (oleh Panel Pakar I) yang berlangsung mulai bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret 2006, Penilaian Lapangan dan masukan pihak berkepentingan dilaksanakan pada tanggal 14 – 23 Maret 2006, Evaluasi Kinerja untuk Pengambilan Keputusan Sertifikasi PHAPL (oleh Panel Pakar II) yang berlangsung pada tanggal 1 s/d 4 Juni 2006 dan Penetapan Keputusan Sertifikasi oleh MUTU Certification.

Setelah melewati empat tahapan proses sertifikasi di atas, pada tanggal 4 Juni 2006, Tim Panel Pakar II memutuskan bahwa PT DRT dinyatakan **LULUS** re-sertifikasi PHAPL sesuai dengan system dan standar LEI dengan peringkat **PERUNGGU**. Artinya UM PT DRT telah mencapai tingkat pengelolaan hutan lestari.

Ringkasan Publik ini merupakan dokumen yang berisi tentang ringkasan dari proses re-sertifikasi di PT DRT dan layak untuk diketahui oleh masyarakat secara luas sebagai salah satu wujud dari proses sertifikasi yang transparan dan akuntable. Dengan diterbitkannya dokumen ini diharapkan para pihak terkait dapat turut serta memantau proses sertifikasi sedemikian sehingga kredibilitas dari program sertifikasi hutan lestari dapat terpelihara dengan baik.

Hormat kami,

PT MUTUAGUNG LESTARI



PT MUTUAGUNG LESTARI

Sustainable Forest Management Certification

PROFIL MUTU Certification & PERSONIL YANG TERLIBAT

Nama Lembaga Sertifikasi : PT. Mutuagung Lestari (MUTU Certification)
Alamat Lembaga Sertifikasi : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953
Telp. (+62)+21 874 0202
Fax . (+62)+21 877 40745
Email : sylvace@mutucertification.com atau
msc@mutucertification.com

Penanggung Jawab : Ir. H. Arifin Lambaga (Presiden Direktur)
Direktur Operasi : Ir. Tony Arifiarchman, MM
General Manager : Ir. Didik Heru Untoro
Manager Operasi : Ir. Taufik Margani
Fasilitator : Ir. Artamur
Fourry Meilano, S.Hut

Tim Panel Pakar I :

- Pakar Bidang Produksi : Ir. Bahruni, MS
- Pakar Bidang Ekologi : Ir. Siswoyo, MSi
- Pakar Bidang Sosial : Ir. Iin Ichwandi MSc

Tim Penilai Lapangan :

- Penilai Bidang Produksi : Ir. Artamur
Ir. Deni A. Novendi
- Penilai Bidang Ekologi : Ir. Haryono
- Penilai Bidang Sosial : Suberto Marpaung, SE

Tim Panel Pakar II :

- Pakar Bidang Produksi : Ir. Bahruni, MS
Anna Juliarti, S.Hut, MSi
- Pakar Bidang Ekologi : Ir. Siswoyo, MSi
Nurul Qomar, S.Hut, MP
- Pakar Bidang Sosial : Ir. Iin Ichwandi MSc
Mangara Silalahi



PROFIL PT DIAMOND RAYA TIMBER

Nama Unit Manajemen : PT. Diamond Raya Timber

Alamat Unit Manajemen :

Pusat : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru – Riau 28142
Perwakilan : Hayam Wuruk Plaza Tower Lt.9, 9A – 9B, Jl. Hayam Wuruk No. 108, Jakarta Barat 11160
Main Camp : Parit Sincin, Bagan Siapi-api, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau

Nama dan Jabatan Pemegang Wewenang Unit Manajemen di Tingkat Pusat dan di Lokasi Penilaian:

No	Nama	Jabatan
1	a. Muharno Ngadimin b. Jeffry Setiady	<u>Dewan Komisaris :</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Komisaris Utama▪ Komisaris
2	a. Surya Agung, SE b. Ir. Arus Mujijat c. Yudianto	<u>Dewan Direksi :</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Direktur Utama▪ Direktur▪ Direktur

Pemilik dan Pemegang Saham :

Akte pendirian perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, pertama dengan Akte Notaris Soehendro Gautama, SH. No. 105 tanggal 20 November 1995 dan yang terakhir Akte Notaris Soehendro Gautama, SH. No. 9 tanggal 2 Maret 1998 dengan komposisi pemegang saham saat ini sebagai berikut :

- Muharno Ngadimin 1.998.000 (40%) lembar saham,
- Supendi 990.000 (20%) lembar saham,
- Jeffry Setiady 900.000 (18%) lembar saham,
- Kastomi 612.000 (12%) lembar saham,
- PT. Uniseraya 500.000 (10%) lembar saham.



Dasar hukum dan Surat Keputusan Pemberian Ijin HPH :

No.	Uraian	Tata Guna Hutan (Ha)						Jumlah
		HP	HP Bakau	HPK	KLG	A.P Perkb.	APL	
1.	FA/N/039/1978, SK Mentan No. 403/Kpts/UM/6/1979	73.000	-	42.000	-	-	-	115.000
2.	SK Menhut No. 518/Kpts-II/1997 (SK Temu Gelang)	79.024	4.675	7.257	-	-	-	90.956
3.	Rekomendasi Gubernur No. 525/EK/2911 Tanggal 7 Oktober 1997	67.119	1.243	-	4.593	1.037	16.964	90.956
4.	SK Menhutbun No. 443/Kpts-II/1998 Tanggal 8 Mei 1998							90.956

Keterangan : HP = Hutan Produksi, HPK = Hutan Produksi Konversi, KLG = Kawasan Lindung Gambut, APL = Areal Penggunaan Lain

Luas Areal Unit Manajemen yang dinilai:

90.956 ha (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 443/Kpts-II/1998).

Lokasi Unit Manajemen :

1. Menurut Letak Geografis : 100°50' - 101°13' Bujur Timur (BT) dan 001°45' - 002°18' Lintang Utara (LU).

2. Administrasi Pemerintahan

Kecamatan : Bangko, Sinaboi, Batu Hampar dan Rimba Melintang

Kabupaten : Rokan Hilir dan Kota Dumai

Propinsi : Riau

Batas Areal Kerja :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Hutan Negara (mulai dari titik ikat S di sekitar Bagan Siapi-api sampai titik R di pantai Selat Malaka) sepanjang sekitar 20 km. Hutan Negara ini berbatasan langsung dengan lahan masyarakat, dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat sudah mendekati areal kerja PT. DRT.



2. Batas sebelah timur dimulai dari titik R sampai dengan titik A sepanjang sekitar 29 km. Bagian ini berbatasan dengan pantai Selat Malaka.
3. Batas sebelah selatan dimulai dari Selat Malaka (titik A) sampai dengan daerah di dekat Desa Lenggadai Hulu (titik U), sepanjang sekitar 44,5 km. Bagian ini berbatasan dengan areal IUPHHK-HT PT. Suntara Gajapati (sekitar 31 km), serta berbatasan dengan areal pencadangan IUPHHK-HT PT. Ruas Utama Jaya (sekitar 13,5 km).
4. Batas sebelah barat dimulai dari Desa Lenggadai Hulu (titik U) sampai daerah sekitar Bagan Siapiapi (Titik S) sepanjang sekitar 46 km. Batas ini paralel dengan jalan raya Bagan Siapiapi dan Sungai Rokan, dengan jarak sekitar 6 km ke arah Kota Bagan Siapiapi. Diantara batas hutan dan jalan raya sebagian besar lahan sudah dialokasikan untuk konversi perkebunan kelapa sawit. Secara resmi, BPN telah melakukan survei sebagian besar dari batas ini. Perusahaan perkebunan sawit selanjutnya memperjelas batas tersebut dengan membuat kanal drainase sepanjang batas dimaksud. Sebagian besar pemukiman berada pada sepanjang pinggir jalan raya yang paralel dengan batas tersebut.

Menurut DAS : DAS Sungai Rokan

Sejarah Kegiatan Pengusahaan Hutan :

Perubahan kondisi sumberdaya hutan hingga yang dimiliki saat ini, baik akibat kegiatan unit manajemen maupun karena sebab yang lainnya. Hutan di areal kerja PT. Diamond Raya Timber seluruh termasuk tipe hutan hujan tropika basah dengan tipe ekologi berupa hutan rawa dan hutan mangrove. Jenis-jenis pohon yang dominan di areal kerja ini antara lain adalah Ramin (*Gonystylus bacanus*), Balam (*Palaquium spp.*), Meranti Rawa (*Shorea spp.*), Durian Burung (*Durio carinatus*), Pisang-pisang (*Mezzettia parviflora*), Kelat (*Eugenia sp.*) dan lain-lain.

Luas areal kerja berdasarkan Forestry Agreement (FA) No. FA/N/039/VI/1978 tanggal 14 Juni 1978 dan SK. Menteri Pertanian No. 403/Kpts/UM/6/1979 tanggal 27 Juni 1979 adalah 115.000 ha, terdiri-dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 73.000 ha dan Hutan Produksi Konservasi (HPK) seluas 42.000 ha.

Berdasarkan hasil pengukuran tata batas temu gelang IUPHHK yang dilaksanakan INTAG dan disuperinpose dengan peta penafsiran potret udara, Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), serta Peta Penafsiran Citra Landsat TM BM 542 Path/Row 127/59 liputan Januari 1997, areal yang dapat di usahakan adalah seluas 90.956 ha seluruhnya terdiri-dari Hutan Produksi Tetap(HP).



Dengan demikian terdapat perbedaan luas HP berdasarkan SK. IUPHHK dengan luas hasil perhitungan sebesar 17.956 ha. Perbedaan ini disebabkan karena areal IUPHHK yang berhutan di masukkan kedalam HP atas dasar negosiasi dan kesepakatan trayek batas di Tingkat Kecamatan Bangko dan Rimba Melintang dan di Tingkat Kabupaten batas temu gelang oleh INTAG Bogor.

Pada hutan alam produksi berlaku Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 564/Kpts/IV-BPHH/1989. Sistem ini membolehkan perusahaan menebang semua pohon komersial yang diameternya lebih dari 50 cm dan siklus tebang yang ditetapkan adalah 35 tahun, khusus untuk hutan rawa berlaku ketentuan untuk jenis Ramin batas limit tebang berdiameter ≥ 35 cm dan jenis komersial non Ramin berdiameter ≥ 50 cm. Namun sejak dikeluarkannya peraturan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 24/Kpts/IV-Set/1996, semua jenis pohon rawa yang boleh ditebang adalah yang berdiameter 40 cm, dengan rotasi tebang selama 40 tahun.

Pada tahun 1998, PT. DRT mengajukan aplikasi sertifikasi hutan ke LEI dan dinyatakan berhasil dengan predikat kelulusan perunggu pada tahun 1999. Pada tahun yang sama, dilakukan resertifikasi oleh LEI dan FSC melalui mekanisme *Joint Certification Protocol* (JCP) dan memperoleh sertifikat "*Well Managed Forest*" pada pertengahan tahun 2001. Semenjak memperoleh sertifikat tersebut, PT. DRT terus memperbaiki kinerja dengan menyiapkan SDM yang handal, membangun standar system PHAPL, melakukan berbagai penelitian, mempelajari Kriteria Indikator LEI dan *Peinciples and Criteria* FSC serta melakukan simulasi implementasi PHAPL di lapangan.

Keberhasilan memperoleh sertifikat ini pada dasarnya merupakan ujian awal bagi PT. DRT untuk mencapai pengelolaan hutan secara lestari. Hal ini tentunya akan berhasil apabila perangkat kebijakan pemerintah dan seluruh *stakeholder* turut serta mendorong upaya pencapaian PHAPL ini.

Perkembangan Produksi

Kegiatan produksi kayu selama jangka waktu pengusahaan ke I (20 tahun) yaitu dari tahun 1979/1980 sampai dengan tahun 1998/1999 mencakup luasan areal seluruhnya 10.499 ha dengan total volume kayu bulat sebanyak 323.227,70 m³. Sementara sejak tahun 1999 sampai 2005 total produksi kayu bulat yang dihasilkan sebanyak 398.859,61 m³ pada areal seluas 10.553,61 ha atau rata-rata per ha sebesar 37,79 m³.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang pengelompokkan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan yaitu Provisi Sumberdaya Hutan PSDR dan Dana Reboisasi (DR), produksi kayu PT. DRT dapat dikelompokkan menjadi :



1. Kelompok Kayu Indah (Ramin)
2. Kelompok Jenis Meranti, terdiri dari jenis kayu : Durian Burung, Meranti Batu, Meranti Bunga, Suntai, Balam, Jangkang Dan Pulau
3. Kelompok Jenis Rimba Campuran, terdiri dari jenis kayu : Bintangur, Geronggang, Pisang-Pisang, Punak, Terentang, Trenggayun, Serapat Dan Medang.

Secara keseluruhan, realisasi produksi dari semua kelompok kayu tersebut sampai tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel berikut.

No.	Tahun	Produksi Tahunan	
		Luas (ha)	Volume (m3)
1	1979/1980	200,00	8.094,30
2	1980/1981	820,00	16.200,53
3	1981/1982	Tidak produksi	Tidak produksi
4	1982/1983	155,00	1.851,09
5	1983/1984	62,00	1.110,00
Jumlah (RKL I)		1.237,00	27.255,92
6	1984/1985	144,00	3.873,79
7	1985/1986	Tidak produksi	Tidak produksi
8	1986/1987	80,00	2.672,85
9	1987/1988	575,00	19.525,35
10	1988/1989	963,00	38.495,13
Jumlah (RKL II)		1.762,00	64.567,12
11	IPK 1987/88	840,00	17.659,69
12	IPK 1988/89	994,00	16.987,38
TOTAL IPK		1.834,00	34.647,07
13	1989/1990	1.433,00	46.415,80
14	1990/1991	1.595,00	39.423,35
15	1991/1992	1.375,00	42.554,87
16	1992/1993	1.633,00	47.154,70
17	1993/1994	1.475,00	40.037,01
Jumlah (RKL III)		7.511,00	215.585,73
18	1994/1995	1.724,00	49.335,07
19	1995/1996	2.210,00	70.108,69
20	1996/1997	2.202,00	69.043,11
21	1997/1998	2.577,00	79.388,25
22	1998/1999	1.786,00	55.352,58
Jumlah (RKL IV)		10.499,00	323.227,70
23	1999/2000	1.208,00	72.274,45
24	2000	993,42	46.961,44



PT MUTUAGUNG LESTARI

Sustainable Forest Management Certification

No.	Tahun	Produksi Tahunan	
		Luas (ha)	Volume (m3)
25	2001	1.733,22	74.477,74
26	2002	1.389,34	41.635,20
27	2003	1.784,40	46.664,49
Jumlah (RKL V)		7.108,38	282.013,32
28	2004	1.745,23	54.473,80
29	2005	1.700,00	62.372,49
Jumlah (RKL VI)		3.445,23	116.846,29
Jumlah Kumulatif		33.396,61	1.064.143,15

Sumber : Revisi Rencana Pengelolaan Hutan Tahun 2004
Laporan Hasil Produksi PT DRT Tahun 2005

TIPOLOGI PT DIAMOND RAYA TIMBER

Penentuan tipologi unit manajemen oleh panel pakar merupakan bahan untuk mempertimbangkan dalam proses penilaian untuk pengambilan keputusan sesuai dengan Pedoman LEI 99-21. Adapun hasil tipologi unit manajemen PT. DRT adalah sebagai berikut:

Tipologi UM Berdasarkan Prinsip Kelestarian Fungsi Ekologi

Dalam skala regional, tipologi unit manajemen berdasarkan prinsip kelestarian fungsi ekologis ditentukan berdasarkan letak unit manajemen didalam kawasan tersebut secara intern yang mempengaruhi intensitas manajemen yang dilakukan untuk mencapai fungsi kelestarian ekologi. Variabel ekologi/lingkungan yang menentukan tipologi unit manajemen adalah derajat fragmentasi habitat dan letak kawasan unit manajemen.

Derajat Fragmentasi Habitat

Berdasarkan Dokumen Revisi Rencana Pengelolaan Hutan Produksi Lestari IUPHHK PT. Diamond Raya Timber (2004), sebagian besar areal HPH PT. DRT termasuk kedalam tipe ekosistem hutan rawa gambut (*peat swamp forest*) dan sebagian kecil termasuk ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove terbentuk di sepanjang pantai sebelah utara dan timur yang berbatasan langsung dengan hutan rawa gambut.

Berdasarkan Dokumen Revisi Rencana Pengelolaan Hutan Produksi Lestari IUPHHK PT. Diamond Raya Timber (2004) dan sumber-sumber data lainnya, batas-batas areal HPH PT. DRT adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hutan Negara sepanjang sekitar 20 km, mulai dari titik ikat S di sekitar Bagan Siapi-api sampai titik R di pantai Selat Malaka. Hutan Negara ini berbatasan langsung dengan lahan masyarakat, dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat sudah mendekati areal kerja PT. DRT. Penutupan lahan Hutan Negara yang ada memang masih berhutan, namun tren ke depan bagain ini berpeluang besar untuk dikonversi menjadi kawasan pengembangan pertanian. Dengan

- demikian, batas areal bagian ini dinilai memiliki ekosistem yang tidak sama dengan areal kerja PT. DRT.
- Sebelah Timur : Batas dimulai dari titik R sampai dengan titik A sepanjang sekitar 29 km. Bagian ini berbatasan dengan pantai Selat Malaka. Dengan demikian, batas areal bagian ini dinilai memiliki ekosistem yang tidak sama dengan areal kerja PT. DRT.
 - Sebelah Selatan : Batas dimulai dari Selat Malaka (titik A) sampai dengan daerah di dekat Desa Lenggadai Hulu (titik U), dengan panjang total sekitar 44,5 km. Bagian ini berbatasan dengan areal pencadangan IUPHHK-HT PT. Suntara Gajapati (sekitar 31 km) yang saat ini masih berupa hutan alam, serta berbatasan dengan areal IUPHHK-HT PT. Ruas Utama Jaya (sekitar 13,5 km) yang telah dikelola. Dengan demikian, batas areal bagian ini dinilai memiliki ekosistem yang tidak sama dengan areal kerja PT. DRT.
 - Sebelah Barat : Batas dimulai dari Desa Lenggadai Hulu (titik U) sampai daerah sekitar Bagan Siapi-api (Titik S) sepanjang sekitar 46 km. Batas ini sejajar dengan jalan raya Bagan Siapi-api dan Sungai Rokan, dengan jarak sekitar 6 km ke arah Kota Bagan Siapi-api. Sebagian kecil lahan pada batas bagian ini sudah dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit. Sedangkan sebagian besar lainnya merupakan Hutan Negara berstatus Kawasan Pengembangan Budidaya Pertanian yang trend pemanfaatan lahannya adalah untuk perkebunan. Dengan demikian, batas areal bagian ini dinilai memiliki ekosistem yang tidak sama dengan areal kerja PT. DRT.

Mengacu pada kondisi tersebut di atas, maka terjadinya distribusi, dispersal dan aliran gen (*gen flow*) suatu sub-populasi ke sub-populasi lain di sekitarnya hanya mungkin terjadi kearah selatan. Dengan demikian derajat fragmentasi habitat unit manajemen PT. DRT tergolong **semi-berfragmen (*semi-fragmented*)**, karena areal HPH PT. DRT yang berbatasan langsung dengan ekosistem hutan alam lain di sekitarnya kurang dari 50%. Nilai sensitifitasnya adalah **2**.



Kesimpulan :		
Berhubungan	Semi-Berfragmen	Berfragmen
Skala Sensitifitas :		
1	②	3

Letak Kawasan yang Dikelola

Secara Fisik

Tipe ekosistem hutan yang terdapat di areal PT. DRT sebagian besar termasuk tipe ekosistem hutan rawa gambut dan sebagian kecil hutan mangrove. Kedua tipe ekosistem ini memiliki karakteristik dan fungsi yang spesifik serta sangat penting bagi seluruh ekosistem secara keseluruhan, sehingga perlu dijaga keutuhannya.

Ekosistem hutan mangrove di areal HPH PT. DRT terbentuk di sepanjang pantai sebelah utara dan timur yang berbatasan langsung dengan hutan rawa gambut. Hutan mangrove mempunyai peranan sebagai pelindung abrasi, intrusi air laut, dan tempat pemijahan udang, ikan, dan biota laut lainnya. Ekosistem hutan mangrove merupakan formasi vegetasi pantai yang kompleks dan dinamis serta memiliki produktivitas tinggi. Ekosistem ini memiliki adaptasi fisiologi dan morfologi yang unik membentuk zonasi vegetasi yang khas dari pantai hingga daratan/rawa gambut. Tumbuhan di areal ini terpengaruh oleh pasang surut air laut dengan kondisi fisik dan lingkungan yang khas, seperti lingkungan yang terlindung, aliran yang tenang, terdapatnya substrat lumpur, air yang payau dan pasang surut air laut.

Hutan rawa gambut mempunyai peranan yang sangat penting dalam tata air (hidroorologis) ekosistem. Gambut merupakan tipe tanah dengan kandungan bahan organik yang sangat tinggi. Berdasarkan *International Agricultural-Oriented*, gambut didefinisikan sebagai tanah dengan kandungan bahan organik lebih dari 30%. Karakteristik fisik dan biologis di lapangan, penumpukan gambut di areal HPH PT. DRT termasuk kedalam bentuk *ombrogenous peat*, yaitu lahan gambutnya memiliki permukaan di atas lahan yang ada di sekitarnya. Tumbuhan yang hidup di areal ini memanfaatkan hara semata-mata dari dalam tanaman itu sendiri, gambut atau secara langsung dari air hujan. Tidak ada hara yang masuk kedalam sistem dari



tanah mineral yang ada di bawah lapisan gambut atau air sungai yang mengalir kedalamnya.

Dalam pengelolaannya, unit manajemen telah mengalokasikan hutan mangrove sebagai kawasan lindung, sedangkan hutan rawa gambut dialokasikan sebagai areal produksi. Meskipun seluruh areal hutan mangrove yang terdapat di areal HPH PT. DRT telah dialokasikan sebagai kawasan lindung, tetapi di dalamnya terdapat pemanfaatan kayu bakau oleh masyarakat untuk bahan arang. Apabila tidak dilakukan upaya yang memadai oleh pihak unit manajemen dan instansi terkait, maka dimungkinkan akan terjadi kerusakan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya. Berdasar pengalaman, rehabilitasi hutan mangrove sering mengalami kegagalan kerana adanya faktor pembatas yang berat secara fisik (edafik), sehingga kawasan ini mempunyai kerawanan fisik.

Hutan rawa gambut juga sangat rawan terhadap gangguan, khususnya jika terjadi pembukaan arealnya. Keterbukaan areal rawa gambut akan menyebabkan terjadinya subsidensi atau menurunnya ketebalan gambut, sehingga peranannya dalam tata air (hidroorologis) ekosistem juga mengalami perubahan. Disamping itu, lahan gambut memiliki sifat *irreversible*, sehingga jika terjadi gangguan yang ekstrim tidak akan dapat kembali ke struktur dan fungsi seperti semula walaupun telah dilakukan rehabilitasi.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas, maka areal kerja PT. DRT berada pada tatanan lokasi makro yang secara fisik tergolong **Rawan Fisik**.

Secara Biologi

Kawasan HPH PT. DRT berada di bagian muara Sungai Rokan di pantai timur Sumatera, sehingga berdasarkan bentang alam yang ada kawasan ini berada pada sebuah semenanjung. Bagian dari kawasan PT. DRT yang masih menyatu dengan hutan alam yang memiliki tipe ekosistem sama adalah di bagian selatan, yaitu yang berbatasan dengan areal Eks HPH PT Silva Saki yang telah cadangkan sebagai areal IUPHHK-HT PT. Suntara Gajapati dan areal IUPHHK-HT PT. Ruas Utama Jaya.

Kawasan PT. DRT juga merupakan wilayah pengembaraan (*home range*) harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Diperkirakan daya dukung kawasan ini mulai menurun, sehingga pada akhir tahun 2005 telah terjadi konflik antara harimau dengan manusia yang menimbulkan korban jiwa dari pekeja penebangan dan mengganggu kegiatan produksi. Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. S.04/Menhut-VII/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang Persetujuan Prinsip Pembentukan Kawasan Konservasi Harimau Sumatera Senepis-Buluhala, areal kerja IUPHHK-HA PT. DRT seluas 90.959 ha dan sebagian wilayah PT. Suntara Gajapati



akan dijadikan kawasan konservasi harimau Sumatera yang akan dikelola dengan pola manajemen kolaborasi. Namun, sampai saat ini, belum ada bentuk Unit Manajemen Kolaborasi yang mengelola di lapangan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan tersebut.

Dalam kondisi seperti ini, maka secara biologi Unit Manajemen PT. DRT terletak pada tatanan lokasi makro yang secara biologi tergolong rawan (**Rawan Biologis**), karena ekosistem hutan di dalam unit manajemen tidak merupakan kesatuan ekologis dengan ekosistem alam lainnya, khususnya yang perlu dilindungi secara biologis.

Berdasar kedua kategori tersebut di atas, maka menurut letak areal kerja HPH PT. DRT mempunyai nilai sensitifitas **3 (Rawan Biologis dan Rawan Fisik)**.

Kesimpulan :			
Aman Biologis & Aman Fisik	Rawan Fisik & Aman Biologis	Rawan Biologis & Aman Fisik	Rawan Biologis dan Rawan Fisik
Skala Sensitifitas :			
1	2	2	③

Tipologi Aspek Ekologi

Berdasarkan kriteria dan indikator tipologi tersebut di atas, tipologi aspek ekologi areal kerja HPH PT DRT termasuk tipologi **02**, yaitu **areal hutan yang semi-berfragmen (fragmented), rawan fisik dan rawan biologis**.

Letak Kawasan UM	Derajat Fragmentasi Habitat		
	Berfragmen	Semi-berfragmen	Berhubungan
Rawan Biologis-Fisik	03	②	02
Rawan Biologis-Aman Fisik atau Aman Biologis-Rawan Fisik	02	02	01
Aman Fisik-Biologis	02	01	01

Tipologi UM Berdasarkan Prinsip Kelestarian Fungsi Sosial

Variabel yang menentukan tipologi berdasarkan prinsip kelestarian fungsi sosial terdiri dari variabel tipologi dan variabel kontrol. Variabel tipologi dibagi menjadi empat bagian, yaitu : Teknik Produksi, Zona Pemanfaatan Kawasan, Tingkat Kepadatan, Motif Produksi. Variabel kontrol terdiri dari : Keragaman mata pencaharian, masa operasi UM, Rentabilitas Usaha dan konflik komunitas.

Tehnik Produksi

Cara pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat di sekitar HPH PT. DRT bervariasi dengan dominasi petani padi dan palawija pada lahan kering, gambut tipis dan lahan basah pasang surut. Selain menanam padi dan palawija, penduduk sekitar HPH PT DRT wilayah Utara juga mengusahakan kebun campuran seperti kelapa, pisang, buah-buahan dan karet. Sedangkan di wilayah Selatan penduduk dominan mengusahakan kebun kelapa sawit. Teknologi yang dipakai untuk mengusahakan lahan pertanian pada umumnya teknologi sederhana. Berdasarkan kondisi tehnik produksi tersebut sebenarnya agak sulit mengkategorikan tipologi tehnik produksi berdasarkan standart LEI dengan empat kategori. Tetapi kecenderungan yang dilihat dari kondisi lapangan, kami menetapkan bentuk-bentuk tehnik produksi komunitas di sekitar HH PT DRT termasuk ke dalam **komunitas pertanian menetap lahan kering**.

Zona Pemanfaatan Komunitas

Walaupun ada pandangan dan klaim masyarakat sekitar HPH PT DRT merupakan wilayah ulayat mereka, namun klaim tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Sejak reformasi bergulir telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam klaim terutama oleh koperasi-koperasi yang dibentuk oleh masyarakat. Dengan diterbitkannya buku menjawab keberadaan hak ulayat di Kabupaten Rohil oleh Rusli Hamidi klaim ulayat pada hutan DRT sangat lemah. Pemanfaatan hasil hutan non kayu hingga saat ini dilakukan di dalam dan luar kawasan UM. Namun secara intensif pemanfaatan kawasan untuk lahan pertanian seperti yang disebutkan di atas dilakukan pada **zona luar kawasan** yang telah disepakati yaitu berkisar 5,2 km hingga 7 km ke arah batas PT DRT.

Tingkat Kepadatan

Berdasarkan hasil surveillance dan diskusi dengan surveyor bahwa penduduk sekitar HPH PT. DRT rata-rata memiliki lahan 2 ha. Sedangkan teknologi yang dipakai masih tergolong sederhana belum memakai tenaga mesin seperti traktor. Dengan adanya kecenderungan nelayan akan beralih ke sektor pertanian karena semakin sedikitnya hasil tangkapan, ke depan kebutuhan lahan akan tinggi apalagi sekitar



3.000 ha telah diusahakan oleh PT. Sindoraya. Saat ini kebutuhan lahan masih tercukupi dengan adanya 5,2 km-7km yang merupakan lahan untuk pengembangan pertanian oleh masyarakat. Disisi lain adanya kecenderungan dan animo petani untuk mengembangkan kelapa sawit membutuhkan lahan yang cukup. Berdasarkan kondisi diatas, kondisi kepadatan agraris dikategorikan **kepadatan agraris sedang**.

Motif Produksi

Sebagian besar penduduk di areal sekitar kawasan PT DRT termasuk ke dalam kategori **subsisten** (untuk kebutuhan sendiri) sebagian kecil masyarakatnya memiliki motif komersial terutama petani-petani kelapa sawit. Para petani padi dan palawija walaupun bukan hanya untuk konsumsi sendiri, namun hasil pertanian tersebut hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun ke depan besar kemungkinan perubahan motif produksi akan terjadi pada motif produksi komersil.

Berdasarkan variabel-variabel tipologi tersebut di atas jika ditinjau dari aspek derajat sensitifitasnya, maka UM. PT. DRT termasuk ke dalam derajat **sensitifitas 09**. Berdasarkan pembobotan derajat sensitifitas di atas, maka tipologi sosial UM. PT. DRT termasuk ke dalam **tipologi 01**, artinya permasalahan sosial ekonomi dan budaya di areal PT. DRT dianggap bukan merupakan prioritas yang cukup mendesak untuk diselesaikan. Namun berdasarkan uraian dari **variabel kontrol** yang terdiri dari : (i) Keragaman mata pencaharian komunitas di areal PT DRT cukup beragam yaitu sebagai petani, nelayan, pemanfaat hasil hutan non kayu, pedanggang dan jasa, (ii) Masa operasi perusahaan PT DRT sudah cukup lama lebih dari 20 tahun, *track record* UM masa lalu akan menjadi cerminan/persepsi bagi karyawan dan komunitas dalam menanggapi rencana UM ke depan, (iii) Rentabilitas usahanya masih di bawah suku bunga bank, dengan indikasi ketidakmampuan dan konsistensi perusahaan untuk menepati hak-hak karyawan secara penuh, membiayai kegiatan PMDH dan biaya sosial lainnya yang telah disepakati oleh UM dan komunitas (iv) Konflik yang potensial berkembang; masih adanya warga komunitas yang menunjukkan ketidaksetujuan akan keberadaan PT DRT, ketidaktahuan batas-batas yang telah disepakati, dan klaim-klaim lainnya. Dengan demikian tipologi UM PT DRT termasuk ke dalam **tipologi 03**, artinya masalah sosial dimasa yang akan datang merupakan prioritas yang harus ditangani.

Tipologi Um Berdasarkan Prinsip Kelestarian Fungsi Produksi

Dengan mengacu pada proses sertifikasi terhadap tipologi yang berlaku selama 5 tahun dari awal penilaian, maka berdasarkan kajian aspek lingkungan, tipologi UM berada pada skala **ordinal 02**. Adapun berdasarkan kajian sosial tipologi UM berada pada skala **ordinal 03**.



Untuk lebih jelasnya mengenai tipologi fungsi produksi dapat dilihat pada **Tabel** berikut ini.

Tipologi Sosial	Tipologi Unit Manajemen Aspek Lingkungan		
	01	02	03
01	1 aman	3 aman	5 tekno
02	2 aman	4 aman	6 tekno
03	7 sosio	9 sosio	11 tekno/sosio
04	8 sosio	10 sosio	12 tekno/sosio

Catatan :

- Kondisi aman (1 s/d 4)
- Kondisi perlu inovasi teknologi untuk meminimumkan dampak negatif terhadap ekosistem biofisik (5 s/d 6)
- Kondisi perlu inovasi teknologi untuk meminimumkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial (7 s/d 10)
- Kondisi perlu inovasi teknologi untuk meminimumkan dampak ekosistem dan lingkungan sosial (11 s/d 12)

Dengan demikian tipologi UM untuk aspek produksi berada pada skala **ordinal 9**. Hal ini berarti bahwa kondisi UM memerlukan inovasi teknologi untuk meminimumkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial.

KEKUATAN & KELEMAHAN PT DIAMOND RAYA TIMBER TERHADAP STANDAR PHAPL – LEI (ASPEK PRODUKSI)

1. KEKUATAN (Aspek Produksi) :

- ◆ Seluruh tata batas luar sudah diselesaikan (temu gelang 100%) demikian juga aspek legalnya terpenuhi.
- ◆ Tata batas diakui oleh instansi pemerintah.
- ◆ Aktual konflik tata batas masih rendah dan dapat teratasi.
- ◆ Tidak ada pengakuan hutan adat karena sudah ada penjelasan dari BPN.
- ◆ Pengamatan pertumbuhan tegakan telah dilakukan dengan baik.
- ◆ UM telah melakukan perhitungan riap.
- ◆ UM telah melaksanakan tahapan pemanfaatan hutan sesuai dg TPTI yang berlaku.
- ◆ UM telah melakukan *Tree Marking* dengan benar.
- ◆ Faktor eksploitasi tinggi tapi memanfaatkan jenis masih kurang.
- ◆ Kondisi jalan rel yang digunakan untuk eksploitasi dipelihara dengan baik.
- ◆ Sarana dan prasarana penebangan dalam kondisi baik.
- ◆ Aktual gangguan hutan masih rendah (perambahan, kebakaran hutan, hama & penyakit dan penebangan tanpa ijin).
- ◆ Secara alami, potensi bahaya kebakaran hutan rendah karena kondisi iklim yang sangat basah.
- ◆ Kerusakan tegakan tinggal relatif kecil.
- ◆ UM tidak melakukan penebangan/pemanfaatan terhadap jenis-jenis pohon yang dilindungi dan tidak ikut memanfaatkan HHNK.
- ◆ Ada cukup bukti bahwa selama masa konsesinya UM relative masih dapat mengontrol luas penebangan (etat luas masih dipatuhi).
- ◆ Kondisi hutan bekas tebangan relative aman dan tidak terjadi gangguan yang bisa menyebabkan berkurangnya areal produktif.
- ◆ UM menyisakan 10% dari luas setiap blok tebangan tahunan sebagai koridor *biodiversity*.

2. KELEMAHAN (Aspek Produksi) :

- ◆ Penataan menurut fungsi kawasan belum terpenuhi, di tingkat perencanaan / peta belum dapat dipastikan lokasi lindung sempadan sungai, meskipun di lapangan ada indikasi kondisi tegakan di sempadan sungai cukup baik, kebutuhan KPPN terpenuhi 300-800 ha.
- ◆ Peta areal kerja belum sesuai titik koordinatnya terutama peta digitasinya.
- ◆ Belum dilakukan studi AMDAL atau minimal monitoring dan evaluasi dampak penebangan terhadap Kawasan Lindung Gambut, secara legal dan teknis Kawasan Lindung Gambut (KLG) belum dapat dimasukan areal efektif produksi.
- ◆ Belum ada bukti yang cukup sejauh mana adaptasi system silvikultur yang telah dilakukan memang konsisten dan menuju pada pengelolaan yang lebih baik.
- ◆ Teknik silvikultur sesuai sengan peraturan (TPTI), tetapi kegiatan pembebasan dan pemeliharaan tidak dilakukan (hanya tahun I).
- ◆ Kegiatan pengkayaan terbatas pada bekas TPn, dan tepi jalan rel, belum ditunjukkan adanya pengayaan di areal bekas tebangan.
- ◆ Data ITT menunjukkan anakan Ramin dan jenis komersial lainnya sangat sedikit dan tidak ada lagi di bekas penebangan sebelumnya, yang menunjukkan perlu tindakan pengayaan.
- ◆ Pengaturan hasil atau produksi tahunan bukan atas dasar riap/stock, tetapi dihitung balik dari realisasi tebangan selama tahun-tahun sebelumnya.
- ◆ Alur kayu jelas, tapi kurang berjalan dengan baik (nomor kayu belum sesuai dengan dokumen tata usaha kayu).
- ◆ Perangkat Sistem Informasi, organisasi dan tindakan ada, tetapi pelaksanaannya kurang benar dengan bukti bahwa permudaan jenis Ramin dan jenis kayu komersial kurang.
- ◆ Belum terkontrolnya penggunaan bahan kimia *Creosot* terhadap pencemaran air.
- ◆ Pengaturan pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat ada, tetapi belum mengakomodasikan kepentingan masyarakat.
- ◆ Terdapat perangkat SIM, namun kurang memadai dan tidak semua tingkat jabatan memanfaatkannya.



- ◆ Belum cukup bukti pelatihan dan kursus terkait dengan personil, khususnya yang memegang posisi middle management saat ini.
- ◆ Kinerja personil/ SDM masih rendah, indikasi data dasar dan peta-peta buruk, perencanaan penataan hutan, pengaturan hasil belum benar, monitoring dan evaluasi kondisi tegakan pd blok tebangan lampau tidak ada, pengolahan data riap belum berjalan sesuai keperluan manajemen.
- ◆ Alokasi dana per kegiatan masih belum proporsional, misalnya kegiatan pembinaan hutan dimana harga persatuan rata-rata mengalami peningkatan yang drastis.
- ◆ Kondisi keuangan UM yang relatif merugi membuat pos-pos kegiatan tidak cukup dana, namun penyediaannya relatif lancar.
- ◆ Kegiatan peningkatan modal hutan terbatas, yang secara langsung hanya penanaman di areal TPn dan sepanjang jalan rel, upaya monitoring dan evaluasi tegakan tinggal terbatas pada ITT saja.

KEKUATAN & KELEMAHAN PT DIAMOND RAYA TIMBER TERHADAP STANDAR PHAPL – LEI (ASPEK EKOLOGI)

1. KEKUATAN (Aspek Ekologi) :

- ◆ Luas kawasan dilindungi yang terganggu hanya seluas 930 ha atau sebesar 4,75% dari luasan kawasan yang dilindungi seluas 19.574,6 ha.
- ◆ Indeks Kesamaan Komunitas antara areal bekas tebangan dengan VF untuk habitus pohon rata-rata sebesar 92,74%, (hampir sama) dengan rincian : strata pohon, tiang, pancang dan semai masing-masing 94,92%, 86,22%, 94,67% dan 95,16%; sedangkan untuk habitus lainnya, seperti : perdu, liana, epifit, herba, bambu, rotan, dan palem belum dilakukan pengukuran/penghitungan.
- ◆ Prosentase spesies yang dimanfaatkan antara areal bekas tebangan dengan virgin forest pada tingkat pohon dan tiang masing-masing sebesar 85,32% dan 79,04%, dengan rata-rata sebesar 82,18%.
- ◆ Spesies tumbuhan langka/endemik/dilindungi pada kawasan khusus di PT. DRT relatif tidak mengalami gangguan yang berarti, baik oleh masyarakat, aktivitas perusahaan hutan maupun kebakaran hutan.
- ◆ Spesies satwa liar langka/endemik/dilindungi pada kawasan khusus di PT. DRT relatif tidak mengalami gangguan yang berarti, baik oleh masyarakat, aktivitas perusahaan hutan maupun kebakaran hutan.
- ◆ Perburuan satwa liar di areal PT. DRT terjadi dalam skala yang lebih kecil, namun perburuan terhadap satwa liar langka/endemik/dilindungi tidak terjadi.
- ◆ Tingkat pengendalian gangguan terhadap spesies langka/endemik/dilindungi di areal PT. DRT memadai.
- ◆ Jumlah spesies tumbuhan langka/endemik/dilindungi yang terdapat di PT. DRT pada areal virgin forest sama dengan areal bekas tebangan, namun masih terbatas pada habitus pohon, sedangkan habitus lainnya belum dapat diketahui.
- ◆ Kondisi habitat satwa liar langka/endemik/dilindungi di areal virgin forest tergolong mantap, sedangkan di areal bekas tebangan kurang cocok. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kasus penyerangan oleh harimau di petak

tebangan (petak 1151, RKT 2005) serta adanya informasi yang menyebutkan bahwa 1 ekor harimau tertangkap dan 6 ekor lainnya masih berkeliaran di sekitar Camp Tengah.

- ◆ SOP yang terkait dengan pengamanan tumbuhan langka/endemik/dilindungi yang terdapat di PT. DRT cukup memadai.
- ◆ Upaya pengamanan tumbuhan langka/endemik/dilindungi di areal bekas tebangan cukup berhasil, dimana jumlah spesies tumbuhan langka/endemik/dilindungi yang terdapat di PT. DRT pada areal virgin forest sama dengan areal bekas tebangan.
- ◆ SOP yang terkait dengan pengamanan satwa liar langka/endemik/dilindungi yang terdapat di PT. DRT cukup memadai.
- ◆ Upaya pengamanan satwa liar langka/endemik/dilindungi yang telah dilakukan oleh pihak UM cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perbandingan antara jumlah spesies satwa liar langka/endemik/dilindungi di areal bekas tebangan dengan virgin forest sebesar 86%.
- ◆ Aksesibilitas terhadap kawasan dilindungi dari kegiatan masyarakat masih rendah (sulit dijangkau), sehingga tingkat gangguan relatif rendah.

2. KELEMAHAN (Aspek Ekologi) :

- ◆ Areal UM sebagian besar merupakan hutan rawa gambut yang rawan terhadap gangguan (adanya keterbukaan arealnya akan menyebabkan terjadinya subsiden atau menurunnya ketebalan gambut), sehingga kawasan yang harus dilindungi cukup luas (21,52%).
- ◆ Belum cukup bukti adanya pengakuan dan penguatan kawasan yang dilindungi oleh masyarakat.
- ◆ Penataan batas terhadap kawasan yang seharusnya dilindungi baru mencapai 6.161 ha (44,93%) dari 19.574,6 ha.
- ◆ Data keanekaragaman fauna, baik yang terdapat di areal kawasan dilindungi maupun di areal virgin forest tidak tersedia.
- ◆ Kualitas air sungai pada 4 (empat) sungai dan sumur penduduk tergolong kurang baik, terutama pada parameter BOD5 dan COD.
- ◆ Hasil pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi hutan masih sulit diukur. Hal ini disebabkan karena tapak penanaman/pengayaan masih terbatas di bekas TPn dan pinggir jalan rel, serta upaya pemeliharaan



lanjutannya kurang nampak di lapangan, sehingga jaminan survive bagi tanaman pengayaan masih belum dapat ditentukan dan dipastikan.

- ◆ Vegetasi yang terdapat di areal kerja PT. DRT dapat dikatakan merupakan struktur vegetasi klimaks. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah strata pohon yang lebih besar dari strata tiang, sehingga diperlukan adanya perhatian khusus dalam proses pemulihannya pasca tebangan.
- ◆ Hasil penyuluhan pelestarian ekosistem hutan termasuk kurang baik karena belum tersedia tenaga khusus menangani aspek pelestarian ekosistem hutan dan program penyuluhan belum ada.

KEKUATAN & KELEMAHAN PT DIAMOND RAYA TIMBER TERHADAP STANDAR PHAPL – LEI (ASPEK SOSIAL)

1. KEKUATAN (Aspek Sosial) :

- ◆ Berdasarkan buku Menjawab Keberadaan Hak Ulayat di Kab. Rokan Hilir karangan Drs. H. Rusdi Hamidi (Ketua BPN Rokan Hilir) dan Drs. Zaimudin BCHK disimpulkan tidak terdapat kawasan hutan adat/ulayat pada kawasan konsesi PT DRT.
- ◆ Tahun 1998 telah melakukan penataan batas konsesi UM dengan bekerjasama dengan DFID program KPHP. Tahun 2000 UM PT DRT telah melakukan penataan batas areal dengan melibatkan berbagai pihak (Pemda, aparat desa, wakil masyarakat setempat, LSM) sehingga areal konsesi berada di luar lahan yang dikuasai masyarakat dan kawasan hutan konversi. Sebanyak 12 desa telah ada kesepakatan tata batas.
- ◆ Keberadaan areal konsesi di luar lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh warga komunitas, klaim lahan telah diselesaikannya pada tahun 2000, sehingga tidak ada lagi sengketa terbuka masalah tenurial.
- ◆ UM PT DRT telah memiliki SOP penyelesaian konflik (SOP No.PK-6BD01 Register 152 Tanggal 2 April 2000).
- ◆ UM mempunyai kebijakan selalu mengedepankan musyawarah (perundingan dan partisipasi warga komunitas) dan tidak menggunakan kekerasan dan manipulatif dalam meyelesaikan semua konflik.
- ◆ Tidak tercatat adanya kasus kekerasan yang terjadi antara karyawan, UM terhadap karyawan dan masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.
- ◆ Pekerja cukup difasilitasi untuk membentuk serikat pekerja dan tidak ada larangan untuk mengadakan perserikatan kerja atau bergabung dengan salah satu serikat yang ada.
- ◆ Tidak terjadi pemisahan baik secara fisik maupun secara sosial atas desa masyarakat sekitar UM sebagai akibat dari kegiatan UM. Tidak ada desa atau kegiatan masyarakat yang berada di areal konsesi.
- ◆ Tidak teridentifikasi tindak kejahatan, konflik SARA dan pelanggaran adat di sekitar wilayah UM.

- ◆ Warga komunitas cukup mampu mengakses dan memanfaatkan kesempatan kerja di PT DRT. Tenaga kerja lokal yang terserap mencapai 31% dari keseluruhan tenaga kerja PT DRT. Sebanyak 61 % karyawan PT DRT berasal dari masyarakat lokal (Riau) tersebar dalam beberapa posisi.
- ◆ Dengan adanya penyerapan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja perusahaan tidak ada konflik yang mengarah pada terancamnya integrasi sosial dan kultural.
- ◆ Telah dilakukan identifikasi terhadap situs budaya sebagai identitas kebudayaan tradisional masyarakat, yaitu kuburan keramat di Parit Aman, makam raja-raja muda di Raja Bejamu, dan makam keramat di Sinaboi.
- ◆ Kegiatan pengusahaan hutan oleh PT DRT berada pada hutan gambut di daerah hilir dimana lokasinya cukup jauh dari pemukiman masyarakat dan dilakukan secara manual sehingga tidak menimbulkan dampak bagi kesehatan masyarakat.
- ◆ Waste management dikelola dengan baik, dampak sangat terbatas/tidak sampai ke lokasi pemukiman/masyarakat.
- ◆ Tidak ada laporan mengenai pencemaran (debu, air, lingkungan lainnya) yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Belum ada informasi keluhan masyarakat berkairan dengan gangguan kesehatan akibat kegiatan UM.
- ◆ Ada jaminan kesehatan untuk tenaga kerja tetap berupa ASKES dan borongan berupa Poliklinik dengan tenaga medis (dokter dan mantri).
- ◆ UM memiliki poliklinik untuk mengatasi kecelakaan kerja ringan dan dapat merujuk ke rumah sakit jika terjadi kecelakaan berat yang tidak dapat ditangani poliklinik.

2. KELEMAHAN (Aspek Sosial) :

- ◆ Diperoleh laporan dari warga komunitas bahwa hasil hutan yang dapat mereka pungut dari areal konsesi semakin menurun dan adanya pengawasan oleh UM terhadap mereka yang masuk areal konsesi terkait pengawasan illegal logging membuat warga sedikit terganggu, sehingga adanya kegiatan PT DRT sedikit banyak mempengaruhi sumber-sumber ekonomi warga komunitas.
- ◆ Ada kompensasi yang diberikan UM kepada warga komunitas dengan memberikan bantuan uang untuk kegiatan PMDH, tetapi dirasakan masih

relatif belum cukup dan tidak tepat sambung (*uncompatible*). Hal ini terkait ketiadaan tenaga/petugas *Community Development (CD)*.

- ◆ Belum ada upaya UM untuk memberikan peningkatan pelatihan bagi komunitas atau karyawan lokal untuk dapat mengakses posisi yang lebih tinggi.
- ◆ Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program PMDH dan bantuan sosial lainnya belum menyentuh langsung kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi lebih mengarah pada bantuan pembangunan sarana fisik.
- ◆ Belum ada perencanaan upaya pengembangan usaha masyarakat oleh UM dan tidak tersedia tenaga/petugas *Community Development*.
- ◆ Belum ada pengaturan oleh UM terhadap peninjauan berkala kesejahteraan karyawan. Tarif upah sudah 5 tahun belum berubah dan akan berubah untuk penyesuaian mulai bulan Juni 2006.
- ◆ Banyak karyawan merasa kesejahteraannya kurang/belum memadai, khususnya berkaitan dengan tingkat pendapatan dan pengembangan karir mereka dimasa datang. Hal ini diindikasikan cukup banyaknya karyawan yang keluar dari perusahaan ini dengan masa kerja yang tidak terlalu lama.
- ◆ Pengembangan jenjang karir dan pelatihan bagi karyawan masih kurang.
- ◆ Proses dan pelaksanaan KKB belum berjalan baik dan posisi karyawan masih lemah sehingga hak-haknya belum sepenuhnya dapat diraih seperti mendapatkan kelayakan upah dan kesejahteraan.
- ◆ Masih terdapat tenaga kerja yang belum sesuai dengan UMR.
- ◆ Belum ada kompensasi dalam karena keterlambatan pembayaran gaji/upah karyawan.

PENETAPAN NILAI BAKU, NILAI AKTUAL DAN BOBOT TERTIMBANG MASING-MASING INDIKATOR

Atas dasar tipologi unit manajemen, maka tim panel pakar II telah melakukan proses pembobotan melalui perangkat *Analitical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan model kelulusan PT DRT. Setelah itu tim panel pakar menentukan nilai baku untuk masing-masing indikator. Agregat dari nilai baku ini adalah merupakan nilai minimum kelulusan bagi unit manajemen, atau nilai perunggu minimum. Penentuan nilai baku juga didasarkan atas tipologi unit manajemen dan karakteristik pengelolaan hutan dari unit manajemen.

Data dan informasi yang diperoleh dari para assessor pada saat proses penilaian lapangan dijadikan dasar bagi tim panel pakar II untuk menentukan nilai aktual yang merupakan nilai kinerja aktual dari unit manajemen.

Berikut adalah gambaran nilai baku, aktual, dan bobot tertimbang dari masing-masing indikator untuk unit manajemen PT DRT.

No	Indikator	Bobot Tertimbang	Nilai Baku	Nilai Aktual
Aspek Produksi				
P1.1	Kepastian penggunaan lahan sebagai kawasan hutan	0,180	Cukup	Baik
P1.2	Perencanaan dan implementasi penataan hutan menurut fungsi dan tipe hutan	0,113	Baik	Cukup
P1.3	Besaran perubahan penutupan lahan hutan akibat perambahan dan alih fungsi kawasan hutan, kebakaran dan gangguan lainnya	0,043	Cukup	Cukup
P1.4	Sistem Manajemen Kebakaran hutan	0,024	Cukup	Cukup
P1.5	Pemilihan dan penerapan sistem silvikultur yg sesuai dg ekosistem hutan setempat	0,144	Cukup	Cukup

No	Indikator	Bobot Tertimbang	Nilai Baku	Nilai Aktual
P1.6	Terjamin nya keberadaan dan macam hasil hutan non kayu	0,036	Cukup	Cukup
P2.1	Pengorganisasian kawasan yang menjamin kegiatan produksi yang kontinu yang dituangkan dalam berbagai tingkat rencana dan diimplementasikan	0,099	Cukup	Cukup
P2.2	Penerapan pengamatan pertumbuhan tegakan dan hasilnya	0,033	Cukup	Baik
P2.3	Produksi tahunan sesuai dengan kemampuan produktifitas hutan	0,038	Cukup	Cukup
P2.4	Efisiensi pemanfaatan hutan	0,013	Baik	Baik
P2.5	Kondisi Tegakan Tinggal	0,021	Cukup	Cukup
P2.6	Keabsahan sistem lacak balak dalam hutan	0,008	Baik Sekali	Cukup
P2.7	Prasarana Pemungutan hasil hutan	0,015	Baik	Baik Sekali
P2.8	Penerapan <i>reduce impact logging</i>	0,024	Cukup	Cukup
P2.9	Pengaturan pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat	0,045	Cukup	Cukup
P3.1	Kesehatan perusahaan	0,092	Cukup	Baik
P3.2	Peran bagi pembangunan ekonomi wilayah	0,031	Cukup	Cukup
P3.3	Sistem Informasi Manajemen (SIM)	0,008	Cukup	Cukup
P3.4	Tersedianya tenaga profesional untuk perencanaan, perlindungan, produksi, pembinaan hutan dan manajemen bisnis	0,016	Baik	Jelek
P3.5	Investasi dan reinvestasi untuk pengelolaan hutan	0,008	Baik	Jelek
P3.6	Peningkatan modal hutan	0,008	Baik	Cukup
Aspek Ekologi				
E1.1	Proporsi luas kawasan dilindungi yang berfungsi baik terhadap total kawasan yang seharusnya dilindungi serta telah dikukuhkan dan/atau keberadaannya diakui pihak-pihak terkait	0,263	Cukup	Cukup

No	Indikator	Bobot Tertimbang	Nilai Baku	Nilai Aktual
E1.2	Proporsi luas kawasan dilindungi yang tertata baik terhadap total kawasan yang seharusnya dilindungi dan sudah ditata batas di lapangan	0,111	Cukup	Jelek
E1.3	Intensitas gangguan terhadap kawasan dilindungi, termasuk dari bahaya kebakaran	0,078	Baik	Baik
E1.4	Kondisi keanekaragaman spesies flora dan/atau fauna di dalam kawasan dilindungi pada berbagai formasi/tipe hutan yang ditemukan di dalam unit manajemen	0,048	Cukup	Cukup
E1.5	Intensitas kerusakan struktur hutan dan komposisi spesies tumbuhan	0,074	Cukup	Baik
E1.6	Intensitas dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah	-	NA	NA
E1.7	Intensitas dampak kegiatan kelola produksi terhadap air	0,045	Cukup	Cukup
E1.8	Efektivitas pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi tegakan/hutan	0,024	Cukup	Cukup
E1.9	Efektivitas teknik pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah	0,009	Cukup	Cukup
E1.10	Efektivitas teknik pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap air	0,005	Cukup	Cukup
E1.11	Efektivitas penyuluhan mengenai pentingnya pelestarian ekosistem hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, dampak aktivitas lewah panen terhadap ekosistem hutan dan pentingnya pelestarian spesies dilindungi/endemik/langka	0,005	Cukup	Jelek
E2.1	Proporsi luas kawasan dilindungi yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan spesies endemik/langka/ dilindungi atau ekosistem unik (kawasan khusus) serta telah dikukuhkan dan/atau keberadaannya diakui pihak-pihak terkait.	0,064	Baik	Cukup

No	Indikator	Bobot Tertimbang	Nilai Baku	Nilai Aktual
E2.2	Proporsi luas kawasan dilindungi yang tertata baik, diperuntukkan secara khusus bagi kepentingan sintasan spesies langka/endemik/dilindungi atau perlindungan ekosistem unik (kawasan khusus) dan sudah ditata batas di lapangan	0,023	Cukup	Cukup
E2.3	Intensitas gangguan terhadap spesies langka/endemik/ dilindungi di dalam kawasan khusus	0,012	Baik	Baik
E2.4	Kondisi spesies langka/endemik/dilindungi di dalam kawasan khusus	0,012	Baik	Cukup
E2.5	Intensitas dampak kegiatan kelola produksi terhadap tumbuhan endemik/langka/dilindungi dan habitatnya	0,125	Cukup	Baik
E2.6	Intensitas dampak kegiatan kelola produksi terhadap satwa liar endemik/langka/dilindungi dan habitatnya	0,042	Cukup	Baik
E2.7	Pengamanan tumbuhan endemik/langka/dilindungi dan habitatnya.	0,037	Baik	Baik
E2.8	Pengamanan satwa liar endemik/langka/dilindungi dan habitatnya	0,019	Baik	Baik
Aspek Sosial				
S1.1	Batas antara kawasan konsesi dengan kawasan komunitas setempat terdeliniasi secara jelas, dan diperoleh melalui persetujuan antarpihak yang terkait di dalamnya	0,164	Baik	Baik
S1.2	Terjaminnya akses dan kontrol penuh masyarakat secara lintas generasi terhadap kawasan hutan adat	0,039	Baik	Baik
S1.3	Terjaminnya akses pemanfaatan hasil hutan oleh komunitas secara lintas generasi di dalam kawasan konsesi.	0,096	Baik	Cukup

No	Indikator	Bobot Tertimbang	Nilai Baku	Nilai Aktual
S1.4	Digunakannya tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat terhadap pertentangan klaim atas hutan yang sama	0,096	Baik	Baik
S2.1	Sumber-sumber ekonomi komunitas minimal tetap mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas secara lintas generasi	0,051	Baik	Cukup
S2.2	Adanya pengakuan dan kompensasi formal (legal) terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat di dalam sistem pengelolaan yang diterapkan oleh unit manajemen	-	Tidak relevan	Tidak relevan
S2.3	Komunitas mampu mengakses kesempatan kerja dan peluang berusaha terbuka	0,114	Baik	Cukup
S2.4	Modal domestik berkembang	0,021	Cukup	Cukup
S2.5	Peninjauan berkala terhadap kesejahteraan karyawan	0,040	Baik	Cukup
S3.1	Terjaminnya hak asasi manusia	0,067	Baik	Baik
S3.2	Minimasi dampak unit manajemen pada integrasi sosial dan kultural	0,037	Baik	Baik
S3.3	Promosi pemberdayaan komunitas dan karyawan	0,020	Cukup	Cukup
S4.1	Minimasi dampak kegiatan unit manajemen pada kesehatan masyarakat	0,093	Cukup	Baik
S4.2	Kerja sama dengan otoritas kesehatan	0,031	Cukup	Cukup
S5.1	Keberadaan dan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)	0,030	Cukup	Cukup
S5.2	Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) dan struktur gaji yang adil	0,017	Baik	Jelek
S5.3	Terjaminnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	0,077	Cukup	Baik

HASIL KUANTITATIF NILAI KINERJA PHAPL PT DRT (KEPUTUSAN SERTIFIKASI)

Keputusan Sertifikasi merupakan hasil akhir atau total penilaian dari kegiatan evaluasi kinerja unit manajemen PT. DRT oleh Panel Pakar II (Aspek Produksi, Ekologi dan Sosial) atas kelulusan/tidak lulus dan peringkat sertifikasi PHAPL (Emas / Perak / Perunggu / Tembaga / Seng) unit manajemen PT. DRT, sesuai dengan Pedoman LEI 99 - 24.

Berikut ini adalah hasil akhir perhitungan keputusan sertifikasi PHAPL Panel Pakar II Unit Manajemen PT. DRT yang merupakan hasil pengolahan data melalui perangkat *analytical hierarchy process* (AHP).

Aspek	Produksi	Ekologi	Sosial
Bobot	0,325	0,325	0,35
Standar	0,424	0,291	0,479
Aktual	0,468	0,310	0,437
Minimum	0,094	0,079	0,091

Total Standar	0,400025	0,400
Total Aktual	0,4058	0,406
Total Minimum	0,088075	0,088
Selang bawah	0,155975	0,156
Selang atas	0,19999167	0,200

Di atas	0,800	Emas
0,600	0,800	Perak
0,400	0,599	Perunggu
0,244	0,399	Tembaga
0,088	0,243	Seng

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan di atas, PT DRT dapat dinyatakan **LULUS** proses sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) sesuai dengan sistem dan standar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dengan peringkat **PERUNGGU**.